



WARTA BUDAYA

Perayaan Satu Dasawarsa UU Keistimewaan DIY

Kesadaran Masyarakat Akses Danais Meningkat

Seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengakses dana keistimewaan, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayaan) DIY tetap bertindak selektif. Pengucuran danais diutamakan bagi yang program dan kegiatannya berdampak luas.



TALKSHOW: Lima kepala dinas kebudayaan kabupaten/kota di DIY saat berbincang dalam acara Rembug Budaya Jumangkah Waspada di Halaman Museum Sonobudoyo tadi malam (30/8).

"**TERUTAMA** memberi kemanfaatan bagi masyarakat," ujar Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Lakhsmi Pratiwi saat Perayaan Satu Dasawarsa Undang-Undang Keistimewaan DIY di Halaman Museum Sonobudoyo tadi malam (30/8).

Menyadari kondisi pemahaman masyarakat mulai meningkat menjadi bukti sosialisasi yang dilakukan tepat sasaran. Sesuai konsep yang disiapkan.

Dian menjelaskan, saat ini masih butuh sosialisasi masif lagi penganggaran dan sistem danais. Sistem anggaran tidak bisa mendadak. Selama ini anggaran ada, namun sistem tidak memungkinkan. Atau terkadang masyarakat yang pengajuan banyak tapi tidak jelas konsep programnya. Maka instansi ini perlu selektif di dalam penganggaran danais untuk kegiatan di masyarakat. "Ada yang *out come*-nya tidak jelas, hanya *output* saja yang dikejar. Kita targetnya yang mampu berdampak. Artinya, yang memang memberi kemanfaatan bagi masyarakat," ujarnya.

Dicontohkan, salah satu kegiatan yang memiliki *out come* besar. Seperti peristiwa wayangan yang setiap hari di DIY diklaim selalu ada even

tersebut. Kegiatan ini tak hanya personal kelompok, namun merupakan satu kesatuan ekosistem wayang di DIY. Sehingga dampak dapat dirasakan tak hanya pada satu orang atau kelompok saja, melainkan menjadikan satu ekosistem yang berdampak besar. "Dampak ekonomi itu adalah bagian dari ikutan yang ingin kita gunakan," jelasnya.

Menurutnya, wayangan selalu ada bagian yang mengikuti misalnya dari sisi kuliner, penyedia catering. Di luar kondisi pandemi pula, biasanya selalu diikuti pedagang-pedagang yang berjualan seperti penjual minuman ronde, kacang rebus, jagung, penjual mainan anak-anak dan masih banyak lainnya. Belum lagi sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam wayangan tersebut. "Itu akan menggerakkan minimal dampak-dampak kecil itu bagian yang kita catat," terangnya.

Dian menyebut sejatinya yang berhak mendapat danais ialah seluruh masyarakat. Namun dengan syarat dan ketentuan berlaku. Seperti misalnya, syarat mewakili komunitas harus memiliki standar dari legalitas. "Karena dananya milik negara, semua punya pertanggungjawaban konsep yang jelas," tambahnya. Acara tersebut dibungkus dengan

talkshow berjudul Rembug Budaya Jumangkah Waspada bertajuk Tantangan dan Strategi Pemanfaatan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan untuk Masa Depan.

Talkshow tersebut menghadirkan berbagai narasumber dari Kepala Dinas Kebudayaan di 5 Kabupaten/Kota.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Jogja Yetti Martanti mengatakan, kendala selama ini masyarakat yang belum bisa mengakses danais karena ketidaktahuan mereka. Atau masih minimnya pengetahuan tentang mekanisme mengakses danais.

"Kalau sudah tahu mekanismenya mereka bisa semuanya mengakses. Keraguan itu mungkin karena mereka *nggak* paham," katanya.

Namun, upaya terus dilakukan Disbud Kota Jogja dengan memperluas cakupan keurahan rintisan budaya dan sanggar kelompok seni. Ini menjadikan sekarang danais sudah banyak diakses oleh masyarakat. Terlebih, jumlah sanggar seni yang dapat mengakses danais berkriteria yang sudah ber-Nomor Induk Kebudayaan (NIK). "Sudah semakin banyak yang kemudian register untuk NIK. Berarti mereka sudah mulai paham mengetahui mekanisme kita untuk mengakses danais," tambahnya. (*/wia/kus/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005